

Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Abad Ke-21

Feri Rizwan

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. E-mail: feririzwan.2022@student.uny.ac.id.

Abstract: This article aims to determine the challenges of the 21st century for Pancasila. The method used in this article is qualitative with a literature study approach. In this article you can find out the challenges for Pancasila as the ideology of the Indonesian state, including religious radicalism, vertical divisions between upper class society and people who feel left behind, and the sinking of democracy into oligarchy. The results of the article show the need for consolidation and actualization of democracy Pancasila as an effort to prevent the potential that could set back the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Pancasila; Challenges of the 21st Century; Radicalism; Vertical Splits; Democracy.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tantangan abad ke-21 bagi Pancasila. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam artikel ini dapat mengetahui tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, antara lain radikalisme agama, perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas dan masyarakat yang merasa tertinggal, serta tenggelamnya demokrasi ke dalam oligarki. Hasil dari artikel ini menunjukkan perlu adanya konsolidasi dan aktualisasi demokrasi Pancasila sebagai upaya mencegah potensi yang dapat memundurkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila; Tantangan Abad 21; Radikalisme; Perpecahan Vertikal; Demokrasi.

1. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi abad 21, setiap negara di dunia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks, termasuk Indonesia. Seorang filsuf, Franz Magnis Suseno menguraikan tantangan global di abad 21 diantaranya meningkatnya krisis demokrasi, ideologi sebagian besar ekstremisme berbasis agama, tenggelamnya sebagian umat manusia ke dalam kemiskinan, runtuhnya lingkungan alam, dan kecerdasan buatan (Suseno, 2022). Hal ini menjadikan tantangan bagi Indonesia sebagai negara yang paling beragam di dunia tentu saja menjadi sebuah ancaman tersendiri jika tidak memiliki komitmen bersama-sama untuk menjaganya.

Namun sesungguhnya komitmen bersama itu, Indonesia telah memiliki sebuah konsensus nasional yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila adalah lima

nilai fundamental, yang diidealisasikan sebagai konsepsi dasar, falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima dasar itu adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2017). Sejalan dengan hal itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat John Gardner (1992) mengatakan:

“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar”. Latif (2022, p. 2).

Merawat serta melestarikan Pancasila di abad 21 ini menjadi sebuah kewajiban yang tentu saja bukan hanya oleh pemerintah melainkan juga oleh segenap komponen bangsa Indonesia, jika ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang. Oleh karenanya, Pancasila sebagai ideologi merupakan hasil konseptualisasi dan representasi gagasan dalam masyarakat Indonesia (Suntana, I., et., al, 2023). Tantangan di abad 21 ini bagi Indonesia, seperti diuraikan (Suseno, 2022) meliputi radikalisme agama, perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas yang makmur dan masyarakat yang merasa tertinggal, dan tenggelamnya demokrasi ke dalam oligarki yang korup.

Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub BNPT CT/VE) Outlook merupakan publikasi tahunan yang memuat analisis tren perkembangan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Indonesia sebagai dukungan substansi bagi perencanaan program dan kebijakan kementerian serta lembaga negara terkait. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 11 temuan dan analisis potensi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme periode 2018-2022 diantaranya melaporkan serangan terorisme menurun, namun ancaman tetap relevan yang merujuk pada jumlah penangkapan terduga teroris (BNPT, 2022). Tidak hanya itu kelompok teroris didominasi kelompok simpatisan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang relevan dengan uraian Franz Magins Suseno.

Selain itu, perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas yang makmur dan masyarakat yang merasa tertinggal. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret tersebut menggambarkan laju pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang belum merata dirasakan masyarakat sampai ke lapisan terbawah (Kompas, 2023). Hal ini menjadi kekhawatiran munculnya sebuah perpecahan vertikal. Oleh karena itu, relevansi Pancasila sangat dinantikan kehadirannya dalam setiap kebijakan publik.

Terakhir, kekhawatiran mungkin muncul adalah tenggelamnya demokrasi ke dalam oligarki sehingga bakal menimbulkan negara yang korup. Kekhawatiran itu muncul disebabkan oleh indeks demokrasi Indonesia yang stagnan. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022 (Tempo, 2023). Nilai tersebut relatif sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021. Tentu saja hal ini bukan kabar baik bagi Indonesia, karena masih tergolong sebagai demokrasi yang cacat (flawed democracy). Meskipun nilai indeks Indonesia tetap,

ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54 (EIU, 2023).

Dalam konteks ini ancaman itu merupakan rezim populis dan kemenangan elektoral faksi-faksi ekstremis seperti di Hongaria, Turki, Polandia, Austria, Perancis, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat (Telaumbanua, 2020). Terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016 sebagai presiden Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap status demokrasi di Amerika Serikat (Levitsky & Ziblatt, 2018). Tidak hanya itu, di dalam pemerintahan Donald Trump kecenderungan yang seringkali menyangkal sesuatu yang sudah jelas, sepele, atau terkesan tidak kontroversial, atau mengarang peristiwa yang tidak pernah terjadi seperti perselisihan mengenai audiensi pelantikan, dan seruan Kellyanne Conway tentang pembantaian Bowling Green (Hyvonen, 2018). Dalam konteks Indonesia, sebagaimana dikemukakan (Latif, 2021) Pancasila sebagai dasar negara sekaligus falsafah bangsa Indonesia telah memiliki relevansinya dalam menghadapi segala permasalahan yang pernah terjadi yaitu dengan modal mental-kultural, modal material, dan modal politikalnya tersendiri.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, dalam konteks ini penulis bukan untuk mendegradasikan hal tersebut di atas. Melainkan penulis memfokuskan permasalahan dalam artikel ini yang telah diidentifikasi agar dapat terperinci dengan tujuan dan lebih terarah adalah sebagai berikut: (1) bagaimana Pancasila menghadapi radikalisme agama?; (2) bagaimana aktualisasi Pancasila menghadapi perpecahan vertikal dalam masyarakat?; dan (3) bagaimana Pancasila menghadapi tantangan demokrasi?

2. Hasil dan Pembahasan

Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (IKHub BNPT CT/VE) Outlook merupakan publikasi tahunan yang memuat analisis tren perkembangan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Indonesia sebagai dukungan substansi bagi perencanaan program dan kebijakan kementerian serta lembaga negara terkait. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 11 temuan dan analisis potensi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme periode 2018-2022 diantaranya melaporkan serangan terorisme menurun, namun ancaman tetap relevan yang merujuk pada jumlah penangkapan terduga teroris (BNPT, 2022). Tidak hanya itu kelompok teroris didominasi kelompok simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Selain itu, perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas yang makmur dan masyarakat yang merasa tertinggal. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret tersebut menggambarkan laju pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang belum merata dirasakan masyarakat sampai ke lapisan terbawah (Kompas, 2023). Hal ini menjadi kekhawatiran munculnya sebuah perpecahan vertikal. Oleh karena itu, relevansi Pancasila sangat dinantikan kehadirannya dalam setiap kebijakan publik.

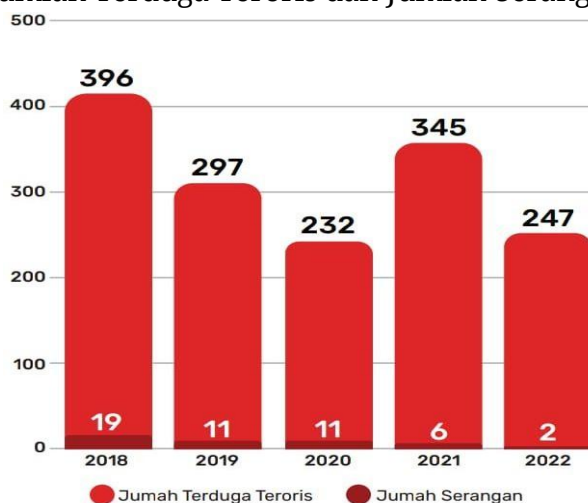
Terakhir, kekhawatiran mungkin muncul adalah tenggelamnya demokrasi ke

dalam oligarki sehingga bakal menimbulkan negara yang korup. Kekhawatiran itu muncul disebabkan oleh indeks demokrasi Indonesia yang stagnan. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022 (Tempo, 2023). Nilai tersebut relatif sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021. Tentu saja hal ini bukan kabar baik bagi Indonesia, karena masih tergolong sebagai demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Meskipun nilai indeks Indonesia tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54 (EIU, 2023).

2.1 Mengkonsolidasikan Pancasila

Pancasila adalah lima nilai fundamental, yang diidealisasikan sebagai konsepsi dasar, falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima dasar itu adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2017). Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub BNPT CT/VE) Outlook merupakan publikasi tahunan yang memuat analisis tren perkembangan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Indonesia sebagai dukungan substansi bagi perencanaan program dan kebijakan kementerian serta lembaga negara terkait. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 11 temuan dan analisis potensi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme periode 2018-2022 diantaranya melaporkan serangan terorisme menurun, namun ancaman tetap relevan yang merujuk pada jumlah penangkapan terduga teroris (BNPT, 2022).

Gambar 1. Jumlah Terduga Teroris dan Jumlah Serangan, 2018-2022



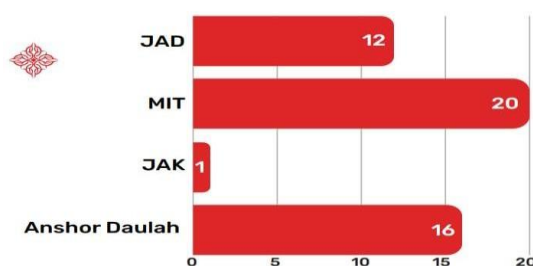
Source: BNPT, 2022

Berdasarkan data di atas pada tahun 2018 jumlah terduga teroris berjumlah 396 orang dan jumlah serangan 19. Pada tahun 2019 jumlah terduga teroris berjumlah 297 orang dan jumlah serangan 11. Pada tahun 2020 jumlah terduga teroris menurun yang berjumlah 232 dan jumlah serangan sama dengan tahun

sebelumnya berjumlah 11. Pada tahun 2021 jumlah terduga teroris kembali meningkat hingga 345 orang dan jumlah serangan menurun menjadi 6. Terakhir pada tahun 2022, jumlah teroris relatif menurun menjadi 247 orang dan jumlah serangan 2. Namun angka ini dinilai masih tinggi dan mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya itu, kelompok teroris didominasi kelompok simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang relevan dengan uraian Franz Magnis Suseno (2022).

Gambar 2. Kelompok Teroris Simpatikan ISIS, 2018-2022



Sumber: BNPT, 2022

Dari Gambar 2 di atas, jumlah terduga dan jumlah serangan yang muncul memiliki afiliasi atau simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) diantaranya, Pertama, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah sebuah kelompok militant Indonesia yang mayoritas anggotanya memiliki koneksi yang kuat dengan dua orang mendiang gembong teroris asal Malaysia, yakni Dr. Azhari dan Noordin M. Top.

Kedua, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah sebuah kelompok teroris asal Indonesia yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Sigi, Sulawesi Tengah. Ketiga, Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) bukanlah kelompok teroris baru. Kelompok ini sudah ada sejak tahun 2016 yang kini dipimpin oleh Bahrunnaim selaku khatibanya. Keempat, Anshor Daulah kelompok teroris ini beranggotakan pendukung ISIS. Oleh karena itu, deradikalisasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk melawan segala serangan dari kelompok-kelompok teroris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis beranggapan perlu adanya kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa untuk memasyarakat pendidikan Pancasila tidak terpaku oleh pendidikan-pendidikan formal. Karena sejatinya pendidikan Pancasila telah menjadi bagian dari pendidikan umum yang berperan penting dalam mentransfer dan membina nilai-nilai yang selaras dengan kepribadian bangsa (Kusdarini, Sunarso, & Arpanudin, 2020).

Dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam menunjukkan arah menghadapi radikalisme agama perlu diharapkan perlu meningkatkan kerja sama dengan para pihak yang terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, kepolisian, masyarakat sipil, Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB), serta yang paling penting Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui dialog antara tokoh-tokoh yang berpaham radikal dengan Ahlussunah Wal Jamaah yang moderat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan menjadi rumah bersama diantara mereka melalui pengaktifan jaringan asosiasional dan jaringan keseharian umat Islam (Mufid, 2013). Selain itu, organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) perlu dilibatkan sebagaimana kedua organisasi keagamaan ini memiliki jangkauan yang sangat luas.

2.2 Mengaktualisasikan Pancasila

Seorang cendekiawan Amerika Serikat John Gardner (dalam Latif, 2022) mengatakan tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama untuk menjaga serta merawatnya. Perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas yang makmur dan masyarakat yang merasa tertinggal. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret tersebut menggambarkan laju pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang belum merata dirasakan masyarakat sampai ke lapisan terbawah (Kompas, 2023).

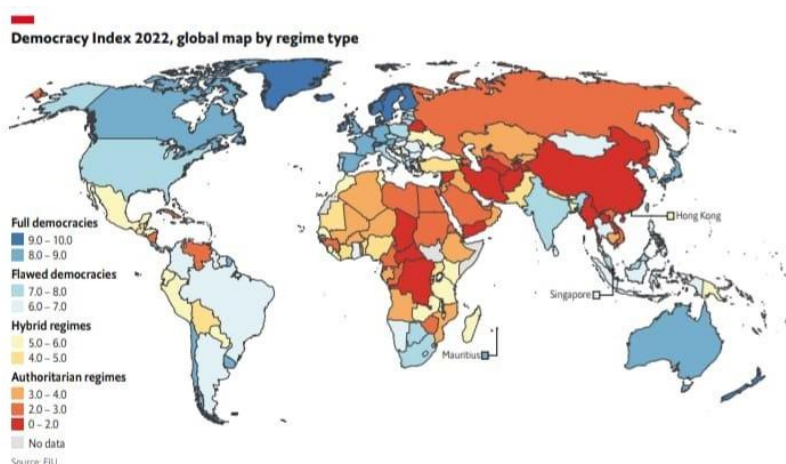
Ancaman yang malah lebih berbahaya adalah adalah perpecahan vertikal. Jika Indonesia makin berkembang baik, dengan kereta api super cepat, kota-kota besar cemerlang, pinggir-pinggir kali yang sudah dibersihkan dari gubug-gubug liar, tetapi orang kecil merasa diabaikan dan digusur untuk memberi tempat bagi mereka yang kaya itu, maka jangan heran jika mereka akan mengikuti ideologi-ideologi selain Pancasila (Suseno, 2022). Oleh sebab itu Pancasila harus benar-benar hadir dalam setiap kebijakan publik. Aktualisasi nilai Pancasila merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kalangan di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila memiliki nilai kajian yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, bersumber dari karakteristik bangsa Indonesia (Aulia & Dewi, 2022).

Sehingga upaya ini sudah seharusnya dilakukan di setiap lembaga pendidikan maupun di masyarakat dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Sesungguhnya peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal ini telah melakukan melalui sosialisasi empat pilar. Namun, masih belum maksimal menysasar konstituen seluruhnya.

2.3 Mewujudkan Negara Paripurna melalui Demokrasi Pancasila

Kekhawatiran mungkin muncul adalah tenggelamnya demokrasi ke dalam oligarki sehingga bakal menimbulkan negara yang korup. Kekhawatiran itu muncul disebabkan oleh indeks demokrasi Indonesia yang stagnan. Berdasarkan riset yang dilakukan *Economist Intelligence Unit* (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022 (Tempo, 2023).

Gambar 3. Democracy Index, 2022



Source: EIU, 2022

Berdasarkan nilai tersebut relatif sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021. Tentu saja hal ini bukan kabar baik bagi Indonesia, karena masih tergolong sebagai demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Meskipun nilai indeks Indonesia tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54 (EIU, 2023). Pancasila sebagai ideologi merupakan hasil konseptualisasi dan representasi gagasan dalam masyarakat Indonesia (Suntana, I., et., al, 2023). Oleh sebab itu, aktualisasi demokrasi Pancasila harus sungguh-sungguh terlaksanakan dengan baik.

Jika segenap komponen bangsa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi Pancasila, maka Indonesia bukan tidak mungkin menjadi negara paripurna seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini tidak berlebihan Indonesia dikategorikan sebagai negara yang cacat dalam demokrasi. Kenyataan itu sungguh terlihat dalam perilaku para pemangku kebijakan dan perilaku elit politik di negara ini yang dipertontonkan kepada publik. Di masa depan bangsa Indonesia tidak boleh lagi untuk tidak berpihak pada pelayanan publik yang tidak transparan, membungkam kebebasan sipil, menabrak peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Dalam buku *How Democracies Die* yang ditulis Levitsky dan Ziblatt (2018) juga memperingatkan tentang ancaman yang akan datang terhadap demokrasi. Ancaman tersebut seperti yang dikemukakan Telaumbanua (2020) merupakan kemunculan rezim populis dan kemenangan elektoral faksi-faksi ekstrimis yang dicontohkannya di Hongaria, Turki, Polandia, Austria, Perancis, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Selain itu Levitsky dan Ziblatt (2018) juga mengidentifikasi para pemimpin yang berpotensi otoriter diantaranya: (1) penolakan atau kurangnya komitmen untuk menjaga aturan demokrasi; (2) penolakan terhadap legitimasi oposisi; (3) toleransi atau dorongan kekerasan; dan (4) kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil oposisi mereka, termasuk media.

Keempat kategori tersebut sungguh dapat dirasakan diakhir-akhir dalam

kebijakan pemerintahan saat ini. Puncaknya terjadi pada saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merubah usia pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Hal ini sepertinya tidak berlebihan jika menyebut keputusan tersebut kurang komitmen terhadap aturan demokrasi dan konstitusi. Karena pada hakikatnya, perubahan itu tidak perlu terjadi mengingat pembatasan usia pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melanggar konstitusi negara Indonesia. Namun demikian, optimisme untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia bukan sesuatu yang mustahil selama pemerintahan yang akan datang dapat menjaga potensi-potensi yang dapat memundurkan kualitas demokrasi itu sendiri.

2.4 Skema Pembudayaan Pancasila

Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga merupakan superstruktur Mental-Kultural yang di mana masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tidak memuja materialisme-hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan. Kemudian, Sila Keempat, merupakan Modal-Politik di mana konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi Pancasila (permusyawaratan yang berorientasi persatuan) negara kekeluargaan dan keadilan (negara kesejahteraan). Sedangkan Sila Kelima, merupakan Modal Material di mana perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan negara (atas sektor strategis) seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Dari kedua relasi ini, yaitu relasi ideologi dan relasi produksi akan dapat mencapai tujuannya perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Conclusion

Memasuki era abad 21, setiap negara di dunia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks, termasuk Indonesia. Pancasila adalah lima nilai fundamental, yang diidealisasikan sebagai konsepsi dasar, falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Merawat serta melestarikan Pancasila di abad 21 ini menjadi sebuah keharusan yang tentu saja bukan hanya oleh pemerintah melainkan juga oleh segenap komponen bangsa Indonesia, jika ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang.

Pertama, Pancasila harus terkonsolidasi sebagai benteng melawan ancaman radikalisme agama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan lembaga-lembaga tinggi negara dan juga masyarakat secara luas. Kedua, Pancasila harus teraktualisasi di dalam setiap kebijakan publik serta tingkah laku komponen bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila harus menjadi roh bagi sistem demokrasi Indonesia yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aulia, T., & Dewi, D.A. (2022). Aktualisasi nilai Pancasila di era globalisasi: tinjauan aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi di kalangan generasi muda. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2): 363-370. <https://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54791>.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022). *Indonesia Knowledge Hub (I-Khub) on CT/VE*. Jakarta.
- Economist Intelligence Unit. (2023). *Democracy Index 2022, Global Map By Regime Type*. London.
- Hyvonen, A.E. (2018). *Definiting Post-truth: Structures, Agents, and Styles*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2018/10/22/defining-post-truth-structures-agents-and-styles/>, 22 Oktober 2018.
- Javier, F. (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan*. Diunduh dari <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>, 20 Februari 2023.
- Kusdarini, E., Sunarso, & Arpanudin, I. (2020). *The implementation of Pancasila education through field work learning model*. *Jurnal Cakrawala*, 39(2): 359-369. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v39i2.31412>.
- Latif, Y. (2017). *Revolusi Pancasila: Kembali ke Rel Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- _____. (2021). *Wawasan Pancasila: Edisi Komprehensif*. Jakarta: Mizan.
- _____. (2022). *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Broadway Books.
- Mufid, A.S. (2013). *Radikalisme dan terorisme agama, sebab dan upaya pencegahan*. *Jurnal Harmoni*, 12(1): 7-17. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/190>.
- Suntana, I., Rusliana., Asdak, C., & Gazalba, L. (2023). *Ketidakpercayaan Ideologis: Memahami Kembali Perdebatan Ideologi Negara, Normalisasi Hubungan Negara-Agama, dan Sistem Hukum di Indonesia*. Elsevier: *Jurnal Heliyon*, 9(3): 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14676>.
- Suseno, F.M. (2022). Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan?. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 1-12. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/80122>.
- Telaumbanua, H.B. (2020). *Preventing the death of democracy from within*. *Jurnal Politik*, 5(2): 313-319. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.1017>.
- Theodora, A., & Primantoro, A.Y. (2023). *Pemulihan Tidak Merata, Ketimpangan Semakin Tajam*. Diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/17/pemulihan-tidak-merata-ketimpangan-semakin-tajam>, 18 Juli 2023.